

PENYIMPANGAN DI RUSUN PENJARINGANSARI SURABAYA

Oleh : Rahardian Erlanda Patridia

NIM: (071114029)

Program Studi Sosiologi Departemen Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Airlangga

Semester Ganjil/Tahun 2016/2017

ABSTRAK

Ketimpangan pembangunan mengakibatkan kota Surabaya mejadi salah satu destinasi urbanisasi di Jawa Timur. Kondisi tersebut mengakibatkan banyaknya masyarakat desa berpindah ke kota Surabaya. Masyarakat desa datang ke Kota Surabaya dengan berbagai motif, walaupun motif ekonomi adalah unsur yang paling dominan, masyarakat desa mempunyai persepsi dan harapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada di daerah asal mereka yaitu pedesaan. Di berbagai kota besar, harus diakui bahwa perkembangan pesat pola kehidupan perkotaan acapkali tidak diimbangi dengan perkembangan kemampuan kota yang berarti. Bahkan beberapa di antaranya justru menurun, baik kualitas maupun kapasitasnya. Sebagai contoh kurangnya hunian yang layak bagi masyarakat menengah kebawah, hal ini dikarekan masih rendahnya tingkat perekonomian masyarakat. Kegagalan pembangunan dan proses marginalisasi yang terjadi di wilayah pedesaan, bukan saja telah terbukti menimbulkan derasnya migrasi penduduk yang berlebihan di wilayah kota besar, tetapi juga setumpuk masalah sosial yang menyertainya. Seperti bisa kita lihat dalam lima tahun terakhir, kota-kota besar di Propinsi Jawa Timur khususnya Surabaya, bukan saja diserbu arus migrasi yang terus meningkat dari waktu ke waktu, tetapi di saat yang sama juga memicu munculnya berbagai permasalahan kota, seperti PKL, permukiman kumuh, dan lain-lain sebagainya.

Sebagai upaya yang nyata telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya terhadap tuntutan kuantitas hunian yang tinggi adalah memberikan fasilitas hunian yang layak dan terjangkau kepada masyarakat menengah kebawah. Yang salah satu wujudnya adalah Rumah Susun Sederhana Sewa Penjaringsari yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas III (UPTD) yang dibawah oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya dimana didalamnya terdiri dari 6 blok, yaitu : Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E, Blok F. Pembagian tersebut Sesuai dengan Perwali No.86 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Surabaya I, Surabaya II, Surabaya III pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, dalam pengelolaan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas III

Penjaringansari (UPTD) masih mengacu pada surat edaran Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum nomor : 03/SE/DM/04 dalam pelaksanaan pengelolaannya. Rumah susun sederhana sewa sendiri diperuntukan kepada para masyarakat gusuran dan masyarakat yang belum memiliki rumah tinggal tetap (dengan bukti surat belum memiliki rumah dari camat setempat). Dikarenakan masyarakat golongan ini masih berperekonomian rendah. Adapun beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan rumah susun sederhana antara lain untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan fungsi lahan dan meningkatkan kualitas hunian padat di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Perpindahan status kepemilikan yang dilakukan oleh pengelola rusun, pada dasarnya merupakan cara baru bagi pengelola rusun. Kondisi tersebut didasarkan pada pemikiran jika rusun tidak di tinggali. Maka rusun tersebut akan menjadi rusak dan tidak terawat. Meskipun demikian tindakan yang dilakukan oleh pengelola rusun tersebut sering kali berbenturan dengan aturan yang ada di pemerintah. Benturan yang terjadi antara tindakan yang dilakukan oleh pengelola rusun dengan aturan yang ada di pemerintah. Dalam pemikiran sosiologis sering dianggap sebagai anomie. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan anomie adalah konsep anomie Robert K Merton. Dalam pemikiran Robert K. Merton mengadopsi konsep anomie Emile Durkheim untuk menjelaskan deviasi di Amerika. Dalam pemikiran anomie Robert K. Merton pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Untuk itu, ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan kultural. Konkritnya, unsur kultur melahirkan *goals* dan unsur struktural melahirkan *means* .

Secara sederhana, *goals* diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia. Sedangkan *means* diartikan aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan. Karena itu, Robert K. Merton membagi norma sosial berupa tujuan sosial (*sociatae goals*) dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*) untuk mencapai tujuan tersebut. Penggunaan sarana yang di kembangkan oleh pengelola rusun dengan memindahkan status kepemilikan. Sebenarnya memiliki orientasi tujuan yang sesuai dengan prinsip pengelaaan rusun. Yaiutu dengan membuat rusun tetap terawat dan menjadi layak huni. Namun, orientasi tujuan yang dikembangkan oleh pengelola rusun, berbenturan dengan aturan awal penghuni rusun. Dimana dalam aturan awal penghuni rusun adalah orang-orang yang dulunya tinggal di bantaran sungai brantas yang terkena kebijakan relokasi oleh pemerintha kota surabaya. Namun, yang terjadi adalah aturan tersebut di kembangkan oleh pengelola rusun. Sehingga banyak penghuni rusun yang bukan dari pindahan warga bantaran kali brantas.

Studi mengeni penyimpangan pengelolaan rusun melibatkan tiga persoalan sekaligus, pertama persoalan teoritis, kedua adalah persoalan empiris, dan ketiga persoalan bagaimana menjelaskan perbedaan penting antara analisis anomie yang dipadukan dengan konsep differensiasi asosiasi. Dalam pemikiran anomie di ungkapkan perilaku penyimpangan pada dasarnya sebagai inovasi pengelolaan rusun. Sehingga perilaku tersebut menjadi aspek yang positif. Akan tetapi adanya benturan antara tindakan inovasi dan aturan yang berlaku membuat tindakan tersebut menjadi menyimpang. Aspek yang kedua tindakan penyimpangan dalam pengelolaan rusun yang awalnya baik menjadi menyimpang dikarenakan perkembangan

penyimpangan tersebut di wariskan dan dilakukan oleh pengelola selanjutnya sehingga dalam pemikiran differensiasi asosiasi perilaku tersebut menjadi menyimpang dikarenakan proses pembelajaran dari institusi yang sudah menyimpang.

Kedua, persoalan empiris, yaitu bagaimana memahami dan kemudian menjelaskan praktek penyimpangan pengelolaan rusun yang dilakukan oleh pengelola rusunawa beserta perpindahan status kepemilikan rusun oleh penghuni rusun. Pemaparan penggalan pengetahuan subjektif para pengelola maupun penghuni rusun terkait status kepemilikan rusun. ini akan digunakan untuk bagaimana pengelola maupun penghuni rusun terkait perpindahan status kepemilikan rusun. Beberapa fase yang dilewati dalam proses ini, yaitu fase pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan hasil wawancara, pemaparan hasil wawancara, dan analisis hasil wawancara.

Ketiga, persoalan praktek penyimpangan yang dilakukan atas dasar meletakkan analisisnya pada persoalan tindakan, historis, dan kehidupan sehari-hari, yakni memahami keberadaan struktur-struktur sosial dalam penyimpangan pengelolaan rusunawa. Sebagai bagian atau produk dari intersubjektivitas dan pengetahuan pada dasarnya memiliki karakter penghuni dan pengelola rusun.

Dimulai dari latar belakang kepemilikan rusun berupa program pemerintah yang dimulai dengan menempatkan warga yang terkena gusuran strek kali ke rusun penjarangan sari, selanjutnya terjadi perpindahan pada status kepemilikan rusun. Dan disusul dengan konsekuensinya terhadap penghuni rusun. Untuk praktek penyimpangan rusun, terjadi dikarenakan tindakan pengelola rusun yang berbenturan aturan yang terciptanya anomie. Tindakan yang sudah menyimpang dalam pemikiran differensiasi asosiasi tersebut dikatakan menyimpang kondisi tersebut tak lepas dari proses pembelajaran pengelolaan rusun dari institusi yang sudah menyimpang.

Kata Kunci: perpindahan status kepemilikan, Rusun

ABSTRACT

Inequality of development resulted in the city becoming one of the destinations Surabaya in eastern Java urbanization. The conditions resulted in many rural communities move to the city of Surabaya. Villagers come to Surabaya with various motifs, although the economic motive is the predominant element, villagers have the perception and expectation to earn higher incomes than in their home region that is rural. In many major cities, it must be recognized that the rapid development of urban life patterns is often not matched by the development of the ability of the city means. Even some of them actually decreased, both in quality and capacity. As an example of the lack of decent housing for the middle down, it dikarekan the low level of the economy. Failure of development and marginalization processes that occur in rural areas, not only has been shown to cause the rapid migration of overpopulation in the big cities, but also social problems accompanying stack. As we can see in the last five years, major cities in the province of East Java, especially Surabaya, not only invaded migration flows continue to increase over time, but

at the same time also trigger the emergence of various problems of the city, such as street vendors, slum and so forth.

As a real effort has been made by city officials to the demands of high occupancy quantity is to provide decent housing facilities and affordable to the middle class society. Which is one of the form is simple Flats Rent Penjaringansari managed by Office Technical Implementation Unit III (UPTD) which is supervised by the Department of Management of Buildings and Land (DPBT) in Surabaya which involves a series of six blocks, namely Block A, Block B, Block C, Block D, Block E, Block F. division tersebut accordance with Perwali 86 Year 2008 on Organization Technical Implementation Unit Flats Surabaya I, II Surabaya, Surabaya III at the Department of Building and Land management of Surabaya, in the management conducted Unit Office Technical implementation III Penjaringansari (UPTD) still refers to the circular Directorate General of Cipta Karya Department of Public Works number: 03 / SE / DM / 04 on implementation of the plan. Modest apartment rental itself intended to the evicted people and people who do not have a permanent home (with documentary evidence not own a house from the local district). Due berperekonomian class society is still low. As for some of the objectives to be achieved in the construction of a simple flat among others, to meet the housing needs of low-income communities, improve the functioning of land and improve the quality of residential solid at locations adjacent to the centers of economic growth

Transfer of ownership by the management of towers, basically a new way for the managers of the towers. The condition is based on the premise if the towers are not inhabited. Then the towers will be broken and not maintained. Although demikian action taken by the manager of the towers are often in conflict with existing rules in government. Collisions between actions taken by the manager of the towers with the existing rules in the government. In sociological thinking is often regarded as anomie. In this case, what is meant by the concept of anomie anomie is Robert K Merton. In the thought of Robert K. Merton adopted the concept of anomie Emile Durkheim to explain the deviation in America. In the thought of anomie Robert K. Merton initially described the correlation between behavior delinkuen at certain stages in the social structure will give rise to, give birth and nurture a condition for violations of the norms of society which is a normal reaction. For that, there are two elements form delinkuen behavior that is the element of social and cultural structures. Concretely, the element of culture spawned goals and structural elements of childbirth means.

In simple terms, is defined as the goals and objectives entrenched interests include basic aspirations of the human skeleton. While the means defined rules and control measures are institutionalized and accepted as a means to an end. Therefore, Robert K. Merton divide social norms in the form of a social purpose (sociatae goals) and the means available (acceptable means) to achieve these goals. Use of means developed by the manager ruun with memindahkan ownership status. Oriental actually has a purpose that is incompatible with the principle pengellaan towers. Yaiutu to make the towers remain untreated and become livable. However, goal orientation developed by the manager of the towers, collide with the rules of the early inhabitants of the towers. Where in the initial rules occupants of the towers are the people who used to live along the Brantas River affected by the relocation policy pemerintha city of Surabaya. However, what happens is that the rules developed by the manager of the towers. So many inhabitants of the towers are not of moving residents brantas riverbank.

The study of the irregularities in the management of towers involves three issues at once, the first issue of the theoretical, the second is empirical question, and the third issue of how to explain the essential differences between the analysis of anomie combined with the concept of differentiation asosisi. In the thought of anomie disclosed irregularities behavior as essentially a flat management innovation. So that this behavior becomes a positive aspect. But a conflict between acts of innovation and the applicable rules makes such actions become distorted. The second aspect of action irregularities in the management of the towers were originally well become distorted due to the development of such deviations inherited and carried out by the manager of the next so that the association differensiasai thought such behavior become distorted due to the learning process of the institution that has been distorted.

Second, the empirical question, namely how to understand and then menjelaskanpraktek irregularities in the management of towers by the management and their rusunawa transfer ownership of towers by the occupants of the towers Exposure excavation subjective knowledge managers and occupants of the towers associated ruswun ownership status. This will be used to how managers and occupants of the towers associated transfer of the ownership status of the towers. Several phases are skipped in this process, namely the phase of secondary data collection related to the interviews, the exposure of the interviews, and analysis of the results of the interview. Thirdly, the issue of the practice of irregularities committed on the basis of its analysis of the issue of action lay, historical and sehari-hari life, namely to understand the existence of structures in the social structure of management irregularities rusunawa. As a part or product of intersubektivitas and knowledge basically have the character of the occupants and managers of the towers.

Starting from the background of the ownership of towers in the form of a government program that begins by placing the affected residents evicted stren time to crawl flat cider, then the displacement of the ownership status of the towers. And followed with consequences for the occupants of the flat. For the practice of distorting the towers, occurs due to the action manager towers conflicting rules that the creation of anomie. Actions that have distorted the thinking of the association said aberrant differentiation of these conditions is not separated from the towers of the learning process management institutions that have distorted

Keywords: transfer of ownership, Rusun

PENDAHULUAN

Kota sebagai tempat berlangsungnya kegiatan masyarakat memiliki berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, yaitu kebutuhan untuk sehari-hari sandang, pangan dan papan, kebutuhan untuk hiburan

sampai dengan kebutuhan akan pekerjaan yang layak, keadaan seperti itu yang seringkali membuat masyarakat daerah lain atau masyarakat dari desa berbondong-bondong pindah ke kota dengan harapan dapat memperoleh kehidupan yang lebih

baik. Keadaan seperti ini dapat dijumpai di kota-kota besar di Indonesia, misalnya saja Surabaya. Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, mengalami perkembangan yang cukup pesat dan telah menjadi semacam magnet terkuat bagi masyarakat di daerah penyangga, terutama daerah pedesaan di sekitar kota Surabaya tersebut. Keberadaan Kota Surabaya yang seperti itu merupakan bagian dari daerah perkotaan di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, para masyarakat yang berasal dari desa datang ke Kota Surabaya dikarenakan di Surabaya terdapat banyak pilihan untuk memperoleh berbagai kesempatan dalam upaya memperbaiki kehidupan mereka.

Ketimpangan pembangunan mengakibatkan kota Surabaya mejadi salah satu destinasi urbanisasi di jawa timur. Kondisi tersebut mengakibatkan banyaknya masyarakat desa berpindah ke kota Surabaya. Masyarakat desa datang ke Kota Surabaya dengan berbagai motif, walaupun motif ekonomi adalah unsur yang paling dominan, masyarakat desa mempunyai persepsi dan harapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada di daerah asal mereka yaitu pedesaan. Di berbagai kota besar, harus diakui bahwa perkembangan pesat pola kehidupan perkotaan acapkali tidak

diimbangi dengan perkembangan kemampuan kota yang berarti. Bahkan beberapa di antaranya justru menurun, baik kualitas maupun kapasitasnya. Sebagai contoh kurangnya hunian yang layak bagi masyarakat menengah kebawah, hal ini dikarekan masih rendahnya tingkat perekonomian masyarakat. Kegagalan pembangunan dan proses marginalisasi yang terjadi di wilayah pedesaan, bukan saja telah terbukti menimbulkan derasnya migrasi penduduk yang berlebihan di wilayah kota besar, tetapi juga setumpuk masalah sosial yang menyertainya. Seperti bisa kita lihat dalam lima tahun terakhir, kota-kota besar di Propinsi Jawa Timur khususnya Surabaya, bukan saja diserbu arus migrasi yang terus meningkat dari waktu ke waktu, tetapi di saat yang sama juga memicu munculnya berbagai permasalahan kota, seperti PKL, permukiman kumuh, dan lain-lain sebagainya.

Pesatnya pertumbuhan penduduk yang terjadi di Surabaya tidak hanya disebabkan oleh proses migrasi masyarakat yang berada di luar Surabaya tetapi juga dikarenakan pertambahan alami, yaitu dari pertambahan penduduk dari Kota Surabaya sendiri. Sebagai kawasan mega-urban, yang namanya jumlah penduduk riil dan berbagai masalah sosial yang

ditimbulkannya sesungguhnya telah keluar dari batas-batas administratif wilayah kota. Sebetulnya, sepanjang pemerintah kota Surabaya mampu memenuhi kebutuhan pelayanan publik bagi penduduk di kawasan mega-urban ini, barangkali sepesat apapun perkembangan kota dihela tidak akan menjadi masalah. Tetapi, lain soal ketika kemampuan pemerintah kota untuk menyediakan fasilitas publik dan melayani kebutuhan warganya yang senantiasa bertambah dengan pesat relatif tak berimbang.

Permasalahan permukiman yang dihadapi kota Surabaya semakin kompleks. Tingginya tingkat kelahiran dan migrasi penduduk yang terbentur pada kenyataan bahwa lahan di perkotaan semakin terbatas dan nilai lahan yang semakin meningkat serta mayoritas penduduk dari tingkat ekonomi rendah, menimbulkan permukiman-permukiman padat dan kumuh di kawasan yang dianggap strategis yaitu kawasan pusat kota, industri dan perguruan tinggi. Dalam upaya pemerintah mengatasi permukiman liar dan kumuh pemerintah kota Surabaya melakukan pembangunan Rumah Susun atau rumah yang disusun secara vertikal untuk memenuhi tuntutan kuantitas hunian yang tinggi. Hal ini dikarenakan langkanya lahan

pada perkotaan yang biasanya padat penghuni. Karena tingginya nilai lahan dan tuntutan keterjangkauan harga sewa, maka pada umumnya rumah sewa di wilayah perkotaan dibangun secara vertikal untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan menurut (Sastra dan Marlina, 2006 : 69).

Alternatif pembangunan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi di atas yaitu pembangunan kearah vertikal, dalam hal ini adalah Rumah Susun. Pembangunan rumah susun ini merupakan konsekuensi logis di kota besar terutama di kawasan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi seperti Surabaya. Di Surabaya sendiri terlihat bahwa keterbatasan lahan bagi permukiman semakin terbatas. Kondisi tersebut sama seperti data dinas cipta karya Kota Surabaya tahun 2015. Berdasarkan data tersebut tercatat. Jumlah bangunan rumah (vertikal dan horisontal) yang ada di Kota Surabaya saat ini adalah ± 678.058 unit rumah. Jumlah penduduk sebesar 2.947.003 jiwa. Dengan asumsi rata-rata anggota KK adalah 4 jiwa, maka seharusnya jumlah rumah yang ada di kota Surabaya adalah 736.751 unit. Berdasarkan kondisi tersebut, maka selisih antara kebutuhan akan rumah dengan jumlah rumah yang ada/ tersedia, menjadi nilai kekurangan kuantitas rumah di Kota

Surabaya saat ini, yaitu sebesar 58.693 unit. Hal ini membawa permasalahan yang cukup kompleks di bidang perencanaan di bidang pengelolaan sumber daya lahan.

Berdasarkan semakin berkurangnya lahan di Surabaya, pemerintah kota Surabaya membuat kebijakan rumah susun. Bukti kebijakan tersebut adalah Surat Edaran Nomor : 03/SE/DM/04 tahun 2004 tentang “ Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pola Unit Pelaksana Teknis (UPT) ” Rumah Susun Sederhana Sewa adalah bangunan gedung bertingkat yang di bangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimanfaatkan dengan Tata Laksana sewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, yang di bangun dengan menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana akan tetapi masih memenuhi standar kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, keamanan dan kenyamanan, dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi lokal meliputi potensi fisik seperti bahan bangunan, geologis dan iklim setempat

serta potensi sosial budaya seperti arsitektur lokal dan cara hidup.

Sebagai upaya yang nyata telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya terhadap tuntutan kuantitas hunian yang tinggi adalah memberikan fasilitas hunian yang layak dan terjangkau kepada masyarakat menengah kebawah. Yang salah satu wujudnya adalah Rumah Susun Sederhana Sewa Penjaringansari yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas III (UPTD) yang dibawah oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya dimana didalamnya terdiri dari 6 blok, yaitu : Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E, Blok F. Pembagian tersebut Sesuai dengan Perwali No.86 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Surabaya I, Surabaya II, Surabaya III pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, dalam pengelolaan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas III Penjaringansari (UPTD) masih mengacu pada surat edaran Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum nomor : 03/SE/DM/04 dalam pelaksanaan pengelolaannya. Rumah susun sederhana sewa sendiri diperuntukan kepada para masyarakat gusuran dan masyarakat yang belum memiliki rumah tinggal tetap (dengan bukti surat belum memiliki rumah

dari camat setempat). Dikarenakan masyarakat golongan ini masih berperekonomian rendah. Adapun beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan rumah susun sederhana antara lain untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan fungsi lahan dan meningkatkan kualitas hunian padat di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Surat Edaran Nomor : 03/SE/DM/04 tahun 2004 tentang “ Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pola Unit Pelaksana Teknis (UPT) ” pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi dari Rusunawa yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian Rusunawa. Namun seiringnya berjalan waktu, permasalahan mengenai pengelolaan rumah susun muncul antara lain mengenai kondisi kebersihan dan pemeliharaan bangunan dari rumah susun serta pola hidup hunian yang mengarah ke kumuh dan tidak sehat. Serta permasalahan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan yaitu penyimpangan peruntukan rumah susun yang seharusnya untuk Tunawisma dan warga kategori miskin justru

dikomersialisasi oleh penyewa kepada pihak ketiga. Selain itu juga terdapat permasalahan yang terkait dengan pengelolaan keamanan yaitu mengenai kurangnya pengawasan keamanan yang disebabkan karena semakin luasnya kawasan rumah susun, sehingga petugas keamanan yang ada dirasa tidak dapat secara optimal untuk mengawasi keamanan di lingkungan rumah susun. Tujuan pembangunan rumah susun pada mulanya adalah memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk mengurangi kawasan kumuh perkotaan nampak mulai pudar dan salah arah.

KAJIAN TEORI DAN METODE PENELITIAN

Teori anomie Robert K Merton

Robert Merton dimulai dengan membahas penjelasan biologis penyimpangan dan menyimpulkan bahwa biologi tidak dapat menjelaskan variasi dari satu masyarakat ke depan dalam sifat dan tingkat penyimpangan. Analisis tersebut mencoba mendiskripsikan menunjukkan perbendaharaan yang tidak tepat serta beberapa asumsi atau postulat kabur yang terkandung dalam teori fungsionalisme. Merton mengeluh terhadap kenyataan bahwa

“sebuah istilah terlalu sering digunakan untuk melambangkan konsep-konsep yang berbeda-beda, seperti halnya dengan konsep yang sama digunakan sebagai simbol dari istilah-istilah yang berbeda”. Bunga utamanya tidak begitu banyak mengapa individu tertentu menyimpang, tapi mengapa tingkat penyimpangan berbeda secara dramatis dalam masyarakat yang berbeda dan untuk sub kelompok yang berbeda dalam masyarakat tunggal. Merton bekerja dalam perspektif fungsionalis keseluruhan yang telah kita ditangani, yang menempatkan banyak penekanan pada peran budaya, khususnya aspek pemersatu, tapi sekarang Merton menyesuaikan konsep ia meminjam dari Durkheim untuk menganalisis situasi di mana budaya menciptakan penyimpangan dan perpecahan. Dalam penggunaan Durkheim, anomie disebut situasi di mana norma-norma budaya memecah karena perubahan yang cepat. Anomi bunuh diri, misalnya, dapat terjadi selama depresi ekonomi utama, ketika orang-orang tidak mampu mencapai tujuan yang telah mereka pelajari untuk mengejar, tetapi juga dapat terjadi ketika perekonomian mengalami booming dan tiba-tiba langit yang limit-- yang orang tidak tahu bagaimana untuk membatasi tujuan mereka

dan puas dengan prestasi mereka. (Ritzer, 2008: 189)

Merton perubahan konsep sedikit, untuk merujuk situasi di mana ada jelas kurangnya kesesuaian antara norma budaya tentang apa yang merupakan keberhasilan dalam hidup (tujuan) dan norma-norma budaya tentang cara yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan (berarti). Dalam formulasi Merton, anomie menjadi penjelasan untuk tingginya tingkat perilaku menyimpang di Amerika Serikat dibandingkan dengan masyarakat lain, dan juga penjelasan untuk distribusi perilaku menyimpang di seluruh kelompok yang didefinisikan oleh kelas, ras, etnis, dan sejenisnya. Amerika Serikat, pada kenyataannya, Merton melihat sebagai contoh polar dari masyarakat di mana tujuan keberhasilan (sering didefinisikan terutama dalam hal moneter) ditekankan untuk semua orang dalam budaya, dan orang-orang yang dikritik sebagai berhenti merokok jika mereka kembali skala tujuan mereka. Di sisi lain, budaya adalah yang terbaik ambivalen dalam norma-norma tentang cara appropriate menjadi successful. Tentu kerja keras dan ambisi, di sekolah dan kemudian di pasar ekonomi, adalah sarana budaya disetujui keberhasilan, tapi ada juga unsur kekaguman untuk baron perampok dan nakal yang melanggar aturan tentang cara

yang tepat tapi mencapai tujuan sukses dengan menyimpang cara. Di Amerika, dengan kata lain, keberhasilan mungkin dinilai banyak lebih tinggi daripada kebajikan. (Paloma, 2007:69)

Selain itu, Amerika memiliki kelompok minoritas yang akses untuk sukses dengan cara konvensional jelas terbatas. Pada periode di mana Merton menulis, kita adalah masyarakat kelas rasial. Hitam Amerika, misalnya, yang sangat terbatas dalam akses mereka terhadap pendidikan, tetapi jika mereka mengalahkan rintangan dan memperoleh pendidikan yang baik, pendidikan yang tidak akan "membeli" mereka sebagai baik pekerjaan seperti itu akan untuk orang kulit putih. Dalam beberapa masyarakat yang menekankan kriteria askriptif dalam mengalokasikan kekuasaan dan hak istimewa, budaya menetapkan standar yang sangat berbeda dari kesuksesan. Seseorang yang lahir sebuah tersentuh dalam sistem kasta India, misalnya, akan belajar untuk tidak bercita-cita untuk jenis kesuksesan yang mungkin tersedia untuk individu kasta. Tapi di Amerika jenis yang sama dari tujuan keberhasilan diadakan untuk semua. Jadi harga yang sangat tinggi dari penyimpangan dan kejahatan, dibandingkan dengan masyarakat lain, dalam analisis Merton

dapat dipahami, pertama sebagai hasil dari menekankan tujuan keberhasilan kami lebih dari kita menekankan cara untuk mencapai tujuan tersebut disetujui, dan kedua, kami menekankan jenis yang sama keberhasilan untuk semua orang bahkan saat balapan, etnis, dan stratifikasi kelas masyarakat membatasi peluang untuk sukses dengan orang-orang dalam kelompok yang kurang beruntung.

Bagaimana orang menanggapi disjungsi ini tujuan dan sarana? Merton menciptakan tipologi adaptasi. Simbol pertama menunjuk hubungan masyarakat dengan norma-norma tentang tujuan; simbol kedua menunjuk hubungan mereka dengan norma-norma tentang sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Robert K. Merton mencoba menjelaskan penyimpangan melalui struktur sosial. Menurut teori ini, struktur sosial bukan hanya menghasilkan perilaku yang konformis saja, tetapi juga menghasilkan perilaku menyimpang. Merton mengemukakan tipologi cara-cara adaptasi terhadap situasi, yaitu konformitas, inovasi, ritualisme, pengasingan diri, dan pemberontakan (perilaku menyimpang). Maka dalam struktur yang ada, hal-hal yang tidak relevan juga disfungsi laten

dipengaruhi secara fungsional dan disfungsional. Merton menunjukkan bahwa suatu struktur disfungsional akan selalu ada. Dalam teori ini Merton dikritik oleh Colim Campbell, bahwa perbedaan yang dilakukan Merton dalam fungsi manifest dan laten, menunjukkan penjelasan Merton yang begitu kabur dengan berbagai cara. Dalam hal ini, Merton tidak secara tepat mengintegrasikan teori tindakan dengan fungsionalisme. Hal ini, berimplikasi pada ketidakcocokan antara intersionalitas dengan fungsionalisme structural. Merton terlalu naif dalam mengedepankan idealismenya tentang struktur dan dengan beraninya dia mengemukakan dia beraliran fungsionalis, tapi dia pun mengkritik akar pemikiran yang mendahuluinya. Tapi ia melihat tekanan terbesar terhadap "inovasi" yang beroperasi di tingkat yang lebih rendah dari sistem stratifikasi. "Di sini" insentif untuk sukses disediakan oleh nilai-nilai mapan budaya dan kedua, jalan yang tersedia untuk bergerak ke arah tujuan ini sebagian besar dibatasi oleh struktur kelas untuk orang-orang dari perilaku menyimpang. (Wardi, 2006:107)

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebuah pendekatan yang memusatkan pandangan peneliti pada wacana-wacana atau gagasan-gagasan yang diproduksi oleh subjek yang diteliti. Penggunaan pendekatan kualitatif ini didasarkan pada pertimbangan bahwa; *subject matter* (materi) dalam penelitian ini menyangkut proses dari suatu tindakan yang ditunjukkan oleh teks-teks yang berisi pemikiran, ucapan, dan tindakan yang dilakukan oleh para pengurus beserta penghuni dari rumah susun dalam mengkonstruksi realitas perilaku menyimpang dalam pengelolaan rumah susun. Dengan melakukan kajian atas realitas penyimpangan tersebut, pada akhirnya studi ini diharapkan dapat melakukan suatu investigasi atas proses penyimpangan sosial yang terjadi dalam pengelolaan rumah susun, termasuk produksi pengetahuan yang ada didalamnya. Realitas menurut pendekatan kualitatif adalah sesuatu yang subjektif. Untuk dapat mengungkap secara mendalam pengalaman para subjek, perlu suatu hubungan yang lebih dekat dengan subjek. Asumsi dasar pendekatan ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis yang diuraikan oleh Creswell (2002) dapat menjelaskan

argumentasi peneliti dalam menggunakan pendekatan ini.

Tipe Penelitian

Seperti tampak dalam judul penelitian ini maka digunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Metode penelitian deskriptif juga banyak dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. Kedua, metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang tingkah laku manusia

Penelitian deskriptif ini digunakan karena peneliti berusaha untuk memberikan gambaran secara terperinci data yang akan diperoleh tanpa bertujuan untuk membuat sebuah kesimpulan umum/generalisasi. Diharapkan dengan metode ini diperoleh

data dan gambaran (deskripsi) yang jelas dan lengkap dengan analisis- analisis yang komprehensif tentang fenomena sosial setempat. Penelitian deskriptif tidak berusaha mencari hipotesis, bukan berarti penelitian ini tidak berangkat dari asumsi- asumsi yang menjadi fokus penelitian, namun memang penelitian ini tidak mengajukan hipotesis untuk diuji sebagaimana dalam penelitian kuantitatif (Idrus, 2007: 24)

Penelitian deskriptif ini digunakan peneliti untuk dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana praktek penyimpangan dalam pengelolaan rumah susun. Selain itu, gambaran fenomena yang disajikan secara deskriptif akan lebih memudahkan peneliti serta masyarakat secara umum dalam mengidentifikasi suatu fenomena tertentu.

Subjek Penelitian

Subjek yang dipilih dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan sifat-sifat yang diketahui sebelumnya. Adapun subjek penelitian ini adalah pengurus-penghuni beserta stakeholder yang berkecimpung dalam aktivitas rusunawa. Metode yang akan dipakai dalam penelitian ini untuk menentukan subjek penelitian atau informan adalah dengan cara Purposif. Cara Purposif

adalah informan ditentukan oleh peneliti dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Subjek yang dipilih dengan cara purposif ini merupakan informan yang diharapkan berkompeten dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pemilihan informan antara lain: Pertama, informan harus memiliki waktu luang untuk wawancara. Kedua, informan memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menceritakan pengalaman dan perasaan mereka di masa lalu dan masa kini dalam kata-kata. Ketiga, pertimbangan bahwa informan adalah termasuk “jenis” orang yang menarik perhatian peneliti.

Bedasarkan konsep purposif tersebut, dalam penelitian ini maka di pilih subjek pertama adalah informan yang berkaitan dengan kebijakan rumah susun. Meskipun menggunakan metode purposif. Namun, dalam realitasnya peneliti juga menggunakan metode snow ball. Kondisi tersebut dapat dilihat dari cara memperoleh informan. Kondisi tersebut tak lepas dari informasi di dapat dari Informan pertama yaitu HP selaku penghuni rusun, dan dari informasi HP maka di dapatkan informasi mengenai pengelola rusun SG dan lima penghuni rusun lainnya. Hanya ada lima penghuni rusun yang dapat di wawancarai di karenakan hanya penghuni

rusun tersebut yang bersedia di wawancarai. Setelah dari data tersebut kemudian dari SG mereferensikan KG dan beberapa aparaturnya pemerintah yang berkonsentrasi dalam pengelolaan rusun. Setelah mendapatkan informasi dari aparat pengelola rusun, maka di dapatkan informan lain hingga berjumlah 10 orang.

Dari 10 informan tersebut dapat dikategorikan sebagai informan subyek dan informan tambahan: Informan subyek adalah informan yang mengetahui seluk beluk rusun Penjaringan Sari dan perkembangannya. Pihak-pihak tersebut meliputi pemerintah yang bertugas mengelola rusun dalam penelitian ini diwakili oleh NS dan SA. Selain itu juga ada orang pertama yang menjadi penghuni rusun yaitu HP. Pemilihan HP dikarenakan penghuni asli yang merupakan program pemerintah dan sudah lama menempati rusun selama 10 tahun. Pemilihan SA dikarenakan pihak pertama yang ditunjuk menangani rusun yang berada dilapangan dan sudah bertugas selama 5 tahun. Dan SA adalah pengurus rusun yang baru ditugaskan dirusun Penjaringan Sari selama 2 tahun. Dari ketiga pihak tersebut bisa di wawancara tetapi hanya sedikit memberi informasi tentang penyimpangan. Untuk pihak-pihak yang lain tentang praktek penyimpangan

tidak sebegitu mengetahui sehingga dijadikan sebagai informasi tambahan. Selain itu informan tambahan banyak yang tidak berkenan diwawancarai terkait praktek penyimpangan.

Meskipun dalam penampilan data hanya di tempatkan 7 orang yang memiliki determinan untuk kondisi isu dalam penelitian Para subyek tersebut adalah orang-orang yang menggunakan fasilitas beserta pihak yang mengelola rumah susun.

Metode Pengumpulan data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dalam bebrapa cara sesuai dengan yang disebut oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai triangulasi data yaitu wawancara mendalam dan observasi.

Metode utama yang digunakan adalah wawancara dengan pedoman wawancara (*interview guide*). Metode-metode tersebut bersesuaian dengan metodologi yang dipilih. Wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan dan data dari individu-individu tertentu sebagai informan untuk keperluan berbagai macam informasi (Keontjoroningrat, 1994;130). Wawancara merupakan bentuk pembincangan, seni bertanya dan mendengar. Peneliti dalam wawancara ini tidaklah berperangkat netral dalam

memandang realitas yang ada. Peneliti lebih dipengaruhi oleh pemahaman yang dimiliki sehingga lebih memandang pemahaman situasioanal (*situated understandings*) yang bersumber dari episode-episode interaksioanal khusus.

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dilaksanakan dengan dua bentuk yakni wawancara terstruktur (wawancara yang dilakukan apabila terdapat perkembangan jawaban dari informasi di luar pertanyaan terstruktur. Namun, tidak terlampaui jauh dari permasalahan yang diteliti). Untuk bentuk yang kedua lebih dekat kepada metode observasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan praktek penyimpangan dalam pengelolaan rumah susun yang tidak dapat diwawancarai. Sehingga dapat menjadi data sekunder yang merupakan data pelengkap bagi penelitian ini. Selanjutnya dari ketiga metode tersebut akan dilakukan *crosscheck* analisa yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari analisa.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan fokus rangkaian secara deskriptif. Data-data yang telah diperoleh dikumpulkan, kemudian diolah dan diseleksi

lalu dianalisis dengan berpedoman pada kerangka teoritik yang telah disajikan. Data-data yang telah diseleksi dan disusun selanjutnya dilakukan pengolahan data. Dalam proses ini dilakukan dengan dua cara yaitu: pertama, membuat pemetaan guna mencari persamaan dan perbedaan klarifikasi atau variasi yang muncul dari data yang tersedia; kedua, proses menghubungkan hasil dengan teori. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis data terdiri dari tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

PEMBAHASAN

Perumahan merupakan masalah pokok dan menjadi kebutuhan dasar dari setiap manusia. Selain itu, perumahan juga merupakan sarana bagi manusia dalam menciptakan tatanan hidup kemasyarakatan dan membantu menumbuhkan jati diri yang sebenarnya dari manusia itu. Ada 4 macam dimensi yang perlu diperhatikan dalam mencoba memahami dinamika perubahan tempat tinggal pada suatu kota, yaitu :

1. Dimensi lokasi.

Mengacu pada tempat-tempat tertentu pada suatu kota yang oleh seseorang atau sekelompok orang dianggap paling cocok untuk tempat

tinggal dalam kondisi dirinya. Kondisi diri ini lebih ditekankan pada penghasilan dan siklus kehidupannya. Lokasi dalam konteks ini berkaitan dengan jarak terhadap tempat kerja.

2. Dimensi perumahan.

Hal ini dikaitkan dengan aspirasi perorangan atau sekelompok orang terhadap macam tipe perumahan yang ada. Oleh karena luasnya aspek perumahan ini, mereka yang berpenghasilan rendah akan memilih menyewa atau mengkontrak saja daripada berangan-angan untuk memiliki rumah.

3. Dimensi siklus kehidupan.

Membahas tahap-tahap seseorang mulai menapak dalam kehidupan mandirinya, dalam artian bahwa semua kebutuhan hidupnya seratus persen ditopang oleh penghasilannya sendiri.

4. Dimensi penghasilan.

Menekankan pada besar kecilnya penghasilan yang diperoleh, dengan asumsi bahwa makin lama seseorang menetap di suatu kota, makin mantap posisi kepegawaiannya dalam pekerjaan, makin tinggi pula

tingkat penghasilan yang diperoleh dalam waktu tertentu.

Penyimpangan pengelolaan penghuni rusun, sadar atau tidak sadar merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengurus sebagai intitusi pemerintah yang menangani rusun. Dan bertugas sebagai pengawas utama rusun. Tindakan yang dilakukan oleh pengelola rusun memungkinkan bisa dianggap sebagai penyimpangan sosial. Kondisi tersebut tak lepas dari definisi secara dasr Penyimpangan sosial. Dimana tindakan tersebut dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. atau, penyimpangan *deviation* adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri *conformity* terhadap kehendak masyarakat. Perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang.

Difinisi sederhana tyerkait perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai norma, jika dianalogikan dalam praktek penyimpangan pengelolaan rusun. Kondisi tersebut bisa menjadi gamabran realitas yang sesungguhnya. Gambaran tersebut tak lepas dari asal-usul penyimpangan pengeloaan rusun. Dimana munculnya penyimpangan pengelolaan rusun berawal dari hilangnya ponghuni rusun dari program relokasi pemerintah kota Surabaya. Dan dari kondisi tersebut maka pengelola rusun selaku pihak pemerintah melakukan inovasi dengan meng “oper” status kepemilikan rusun kepada pihak yang membutuhkan. Akan tetapi dikarenakan tindakan yang diambil oleh pengelola rusun tidak terakomodir dengan aturan awal pengadaan rusun. Maka tindakan tersebut dianggap menyimpang. Karena meskipun tindakan yang diambil bertujuan untuk hal positif namun bertentangan dengan aturan. Selain itu, tindakan yang diambil oleh pengelola rusun yang dianggap menyimpang dianut oleh pengelola rusun selanjutnya. Dan dalam situasi inilah, perilaku menyimpang di pelajari. Sehingga pengelola rusun yang mempelajari tindakan tersebut dianggap menyimpang.

Dimensi Anomi Dalam Pengelolaan Rusun

Perpindahan status kepemilikan yang dilakukan oleh pengelola rusun, pada dasarnya merupakan cara baru bagi pengelola rusun. Kondisi tersebut didasarkan pada pemikiran jika rusun tidak di tinggali. Maka rusun tersebut akan menjadi rusak dan tidak terawat. Meskipun demikian tindakan yang dilakukan oleh pengelola rusun tersebut sering kali berbenturan dengan aturan yang ada di pemerintah. Benturan yang terjadi antara tindakan yang dilakukan oleh pengelola rusun dengan aturan yang ada di pemerintah. Dalam pemikiran sosiologis sering dianggap sebagai anomie. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan anomie adalah konsep anomie Robert K Merton. Dalam pemikiran Robert K. Merton mengadopsi konsep anomie Emile Durkheim untuk menjelaskan deviasi di Amerika. Dalam pemikiran anomie Robert K. Merton pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Untuk itu, ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen

yaitu unsur dari struktur sosial dan kultural. Konkritnya, unsur kultur melahirkan *goals* dan unsur struktural melahirkan *means* .

Secara sederhana, *goals* diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia. Sedangkan *means* diartikan aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan. Karena itu, Robert K. Merton membagi norma sosial berupa tujuan sosial (*sociatae goals*) dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*) untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perkembangan berikutnya, pengertian anomie mengalami perubahan dengan ***adanya pembagian tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam masyarakat yang terstruktur***. Misalnya, adanya perbedaan-perbedaan kelas-kelas sosial yang menimbulkan adanya perbedaan tujuan-tujuan dan sarana yang tersedia. Konsep Anomie tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

“dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia

tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan, maka dengan demikian akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut". (dalam Bachtiar Wardi. 2006 :75)

Penggunaan sarana yang di kembangkan oleh pengelola rusun dengan memindahkan status kepemilikan. Sebenarnya memiliki orientai tujuan yang sesuai dengan prinsip pengellaan rusun. Yaiutu dengan membuat rusun tetap terawat dan menjadi layak huni. Namun, orientasi tujuan yang dikembangkan oleh pengelola rusun, berbenturan dengan aturan awal penghuni rusun. Dimana dalam aturan awal penghuni rusun adalah orang-orang yang dulunya tinggal di bantaran sungai brantas yang terkena kebijakan relokasi oleh pemerintha kota surabaya. Namun, yang terjadi adalah aturan tersebut di kembangkan oleh pengelola rusun. Sehingga banyak penghuni rusun yang bukan dari pindahan warga bantaran kali brantas. Banyaknya penghuni yang bukan berasal dari warga bantaran jkali brantas , menjadikan tindakan yang diambil oleh pengelola rusun menjadi menyimpnag. Karena tindakan tersebut tidak bisa diakomodir oleh aturan yang dibuat oleh pemerintah kota surabaya terkait penghuni rusun. Dan dari konsep inilah praktek anomie

dapat didiskripsikan. Selain tentang tindakan inovasi, konsep anomie dapat dikembangkan dan di diskripsikan dengan terjadi karena “perbedaan struktur kesempatan”.

Penyimpangan yag dilakukan oleh pengelola rusun terkait status kepemilikan, meskipun dapat dikategorikan sebagai perilaku meyimpang karena dalam dimensi anomi, namun dalam konsep anomie yang dikembangkan oleh merton. Tindakan tersebut dapat teratasi dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Masyarakat harus tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat, karena adanya tekanan moral (**konformitas/conforming**).
2. Harus tetap memelihara tujuan yang terdapat dalam masyarakat, tetapi masyarakat pun diperbolehkan merubah sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut (asalkan yang halal) (**inovasi/innovation**). Masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan (dipositifkan) dan memakai tujuan yang telah ditentukan (oleh Tuhan) (**Ritualisme/ritualism**).
3. Untuk mengatasi anomie, warga masyarakat juga harus mengadakan

pemberontakan (rebellion) terhadap sarana dan tujuan yang ada dalam masyarakat, dan kemudian warga masyarakat harus berusaha untuk mengubahnya dan menggantinya menjadi sarana dan tujuan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, namun sebelum masyarakat mengadakan *rebellion*, terlebih dahulu harus mengadakan penarikan diri (retreatisme) dari tujuan dan sarana yang terdapat dalam masyarakat.

Robert K. Merton mengemukakan lima cara mengatasi anomie dalam setiap anggota kelompok masyarakat dengan tujuan yang membudaya (*goals*) dan cara yang melembaga (*means*), seperti tampak pada tabel Model of Adaptation yang tercantum di bab pertama. Dalam penjelasan tabel tersebut di deskripsikan tentang penyesuaian dari perilaku menyimpang. Penyesuaian tersebut terbagi dalam 5 bentuk. Kelima bentuk penyesuaian diri yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Toleransi yang digunakan untuk mentolerir penyimpangan dalam dimensi anomie, memang dapat membuat tindakan

menyimpang tersebut dapat dimaklumi. Dalam kasus penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola rusun penyimpangan tersebut ditolerir dengan adanya konformitas. Konformitas disini berlaku dengan cara, ketika tindakan yang diambil oleh pengelola rusun tersebut terbaik untuk perkembangan baik rusun kedepan baik dari sisi penghuni maupun dari sisi pengelolaan. Maka tindakan penyimpangan tersebut masih di tolerir. Tindakan toleransi tersebut dalam pemikiran Merton sering dianggap sebagai tindakan penyesuaian. Tindakan tersebut jika dibuat skema penyesuaian diri Robert K. Merton di atas maka inovasi, ritualisme, penarikan diri dan pemberontakan merupakan bentuk penyesuaian diri yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Karena itu, pengadaptasian yang gagal pada struktur sosial merupakan fokus dari teori Robert K. Merton (*Problems of access to legitimate means of achieving the goals are the focus of Anomie Theory*). Dalam skema mengenai anomie, praktek perpindahan status yang dilakukan oleh pengelola rusun, merupakan inovasi. Dan dalam pemikiran perilaku adaptasi Robert K. Merton inovasi merupakan tindakan yang menyimpang. Kondisi tersebut dikarenakan inovasi selalu berbenturan dengan aturan yang ada. Dan

dalam penelitian ini, inovasi adalah mengelola rusun dengan cara memindahkan status kepemilikan rusun. Tindakan seperti ini meskipun memiliki orientasi yang baik, namun karena tindakan tersebut melanggar aturan tentang kepemilikan rusun maka tindakan tersebut dianggap negatif. Meskipun demikian, pemikiran negatif atau tidak dalam proses perpindahan status kepemilikan oleh pengelola rusun. Dapat dilihat dari pemikiran dialektik pengelola rusun, penghuni maupun pemerintah terkait tindakan tersebut.

KESIMPULAN

Studi mengenai penyimpangan pengelolaan rusun melibatkan tiga persoalan sekaligus, pertama persoalan teoritis, kedua adalah persoalan empiris, dan ketiga persoalan bagaimana menjelaskan perbedaan penting antara analisis anomie yang dipadukan dengan konsep differensiasi asosiasi. Dalam pemikiran anomie diungkapkan perilaku penyimpangan pada dasarnya sebagai inovasi pengelolaan rusun. Sehingga perilaku tersebut menjadi aspek yang positif. Akan tetapi adanya benturan antara tindakan inovasi dan aturan yang berlaku membuat tindakan tersebut menjadi menyimpang. Aspek yang kedua tindakan penyimpangan dalam pengelolaan rusun

yang awalnya baik menjadi menyimpang dikarenakan perkembangan penyimpangan tersebut diwariskan dan dilakukan oleh pengelola selanjutnya sehingga dalam pemikiran differensiasi asosiasi perilaku tersebut menjadi menyimpang dikarenakan proses pembelajaran dari intitusi yang sudah menyimpang.

Kedua, persoalan empiris, yaitu bagaimana memahami dan kemudian menjelaskan praktek penyimpangan pengelolaan rusun yang dilakukan oleh pengelola rusunawa beserta perpindahan status kepemilikan rusun oleh penghuni rusun. Pemaparan penggalan pengetahuan subjektif para pengelola maupun penghuni rusun terkait status kepemilikan rusun. ini akan digunakan untuk bagaimana pengelola maupun penghuni rusun terkait perpindahan status kepemilikan rusun. Beberapa fase yang dilewati dalam proses ini, yaitu fase pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan hasil wawancara, pemaparan hasil wawancara, dan analisis hasil wawancara.

Ketiga, persoalan praktek penyimpangan yang dilakukan atas dasar meletakkan analisisnya pada persoalan tindakan, historis, dan kehidupan sehari-hari, yakni memahami keberadaan struktur-struktur sosial dalam penyimpangan pengelolaan rusunawa. Sebagai bagian atau

produk dari intersubektivitas dan pengetahuan pada dasarnya memiliki karakter penghuni dan pengelola rusun. Rangkaian benang merah dalam kesimpulan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dimulai dari latar belakang kepemilikan rusun berupa program pemerintah yang dimulai dengan menempatkan warga yang terkena gusuran stren kali ke rusun penjarangan sari, selanjutnya terjadi perpindahan pada status kepemilikan rusun. Dan disusul dengan konsekuensinya terhadap penghuni rusun.
2. Untuk praktek penyimpangan rusun, terjadi dikarenakan tindakan pengelola rusun yang berbenturan aturan yang terciptanya anomi. Tindakan yang sudah menyimpang dalam pemikiran diferensiasi asosiasi tersebut dikatakan menyimpang kondisi tersebut tak lepas dari proses pembelajaran pengelolaan rusun dari institusi yang sudah menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, Wardi. 2006. Sosiologi Klasik. Remaja Rosda : Bandung
- Brown, B., Perkins, D. D., & Brown, G. (2003). Place attachment in a revitalizing neighborhood: Individual and block levels of analysis. *Journal of Environmental Psychology*, 23, 259-271.

- Brown, G., & Raymond, C. (2007). The relationship between place attachment and landscape values: Toward mapping place attachment. *Applied Geography*, 27, 89-111.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.
- Dalton, J. H., Elias, M. J., & Wandersman A. (2007). *Community psychology: Linking individuals and communities* (2nd international student ed.). Belmont: Thomson Wadsworth.
- Giddens, Anthony. 2004. SOSIOLOGI Sejarah dan Berbagai Pemikirannya. Kreasi Wacana : Bandung.
- Lewicka, M. (2011). Place attachment: How far have we come in the last 40 years? *Journal of Environmental Psychology*, 31, 207-230.
- Poloma, Margaret M. 2007 *Sosiologi kontemporer*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Raymond, C. M., Brown, G., & Weber, D. (2010). The measurement

- of place attachment: Personal, community, and environmental connections. *Journal of Environmental Psychology*, 30, 422-434.
- Ritzer, George and Douglas J. Goodman. 2008. Troei Sosiologi dari sosiologi klasik sampai perkembangan mutakhir teori sosial post modern. Kreasi Wacana : Yogyakarta.
 - Santoso Topo, S.H., M.H dan Eva Achjani Zulfa, S.H, 2008, Kriminologi, grafindo, jakarta
 - Shamsuddina, S., & Ujang, N. (2008). Making places: The role of attachment in creating the sense of place for traditional streets in Malaysia. *Habitat International*, 32, 399-409.
 - Sutrisno, E. L. (2009). The oral history of everyday life in Rumah Susun Penjaringan Sari, Surabaya. Dalam Laboratory of Social Psychology University of Surabaya (Ed.), *Inside Surabaya: A portrait of urban living in 21st century indonesia*.
 - Veitch, R., & Arkkelin, D. (1995). *Environmental psychology: An interdisciplinary perspective*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.